BAB II

Gambaran Umum Perusahaan

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Tahun 1987 adalah tahun keramat bagi BTN, karena pada saat itu berdasarkan *Koninjlik Belsuit* No. 27 di Hindia Belanda didirikan Postspaarbank yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan naman Jakarta. Tujuan pendirian antara lain adalah mendidik masyarakat agar gemar menabung dan sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat luas. Sampai dengan penghujung tahun 1931 peranan *Postspaarbank* dalam penghimpunan dana masyarakat terus meningkat. Sampai dengan tahun 1939, dana yang berhasil dihimpun berjumlah Rp. 54 juta. Pencapaian ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan pada masa itu. Selain itu yang patut dicatat antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1934 adalah dibukanya kantor-kantor cabang Postpaarbank di Makasar, Surabaya, Jakarta, dan Medan.

Pada tahun 1934 juga dikenal sebagai “era mesin-mesin akuntansi“ dan pengenalan sertifikat *current account.* Ketika pada tahun 1940 Jerman menyerbu Netherland, terjadi pengambilan dana besar-besaran oleh para nasabah *Posstpaarbank.* Hanya dalam beberapa hari sebanyak Rp. 11 juta dibayarkan kepada para nasabah, hal ini tidak berlangsung lama.

Tahun 1941 kepercayaan nasabah timbul kembali, dan pada tahun yang sama berhasil dihimpun dana sebesar Rp. 58,8 juta. Terjadilah satu masa yang dapat dinamakan Masa Antara, karena tidak dapat di masukan dalam sejarah Bank Tabungan Pos yaitu antara Maret 1942-1946. Tahun 1942 Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda dan *Postspaarbank* dibekukan. Pemerintah Jepang

mendirikan *Tyokin Kyoku*. Misi "gemar menabung "*Tyokin Kyoku* gagal, karena hal tersebut dirasakan sebagai paksaan oleh rakyat Indonesia. Pada masa ini cabang Jogyakarta dibuka. Pendudukan Jepang di Hindia tidak berlangsung lama. Bangsa Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. "*Tokyin Kyoku* " diambil alih dan namanya diganti "Kantor Tabungan Pos (KTP)", yang diprakasai oleh Bapak Darmosoentaso, Direktur pertama Kantor Tabungan Pos. Kantor Tabungan Pos berperan besar dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan "Oeang Republik Indonesia". Dalam masa itu Kantor Tabungan Pos tidak dapat bekerja dengan aman, karena aksi Militer Belanda.

Tanggal 19 Desember 1946 Kantor Tabungan Pos dan kantor-kantor cabangnya diduduki Belanda. Bulan Juni 1949 Pemerintah RI membuka sekaligus mengganti "Kantor Tabungan Pos" menjadi "Bank Tabungan Pos RI", dengan maksud untuk membereskan pekerjaan KTP yang telah berantakan. Kantor ini bekerja sampai akhir tahun 1949. Selanjutnya, pemerintah hanya mengakui Bank Tabungan Pos RI sebagai lembaga tabungan yang kemudian tahun 1950 namanya diganti menjadi Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos semula kegiatannya masuk dalam lingkungan Kementrian Perhubungan. Tetapi kemudian beralih di bawah koordinasi pengawasan Departemen Keuangan di bawah Mentri Urusan Bank Sentral. Pendirian Bank Tabungan Pos ditetapkan berdasarkan UU No.36 Tahun 1953 (dimuat dalam Lembaran Negara No.86 Tahun 1953 tanggal 28 Desember 1953). Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal lahirnya Bank Tabungan Negara (Peraturan Direksi No. 12/Dir/Bidir/0988). Menjelang kejatuhan Orde Lama (tahun 1964), sempat dilakukan tindakan awal untuk menyatukan seluruh Bank-Bank Pemerintah yang

ada pada waktu itu menjadi ”Bank Tunggal” dengan nama Bank Negara Indonesia.

Di dalam masa peralihan sebelum diintegrasikan pada Bank-Bank Pemerintah yang ada (Kecuali Bank Dagang Negara) masing-masing dijadikan ”Unit” dari Bank Tunggal ini dan BTN merupakan Unit V dari Bank Negara Indonesia sebagai ”Unit”, BTN pada waktu itu sempat kehilangan kekuasaan dan wewenang, karena BTN langsung ditempatkan di bawah kekuasaan urusan Bank Sentral pada saat itu sedangkan BTN hanya dipimpin oleh seorang ”Direktur Koordinator”. Dengan tumbangnya Orde Lama, dan berkuasanya Orde Baru, maka prakasa pembentukan Bank lebih sehat. Setelah Orde Baru berhasil mengatur kembali kehidupan perekonomian yang mendapat perhatian utama, maka didahului lahirnya UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 Tahun 1967 ditetapkan UU No. 20 Tahun 1968 mengenai Pendirian Bank Tabungan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, maka tugas pokok BTN adalah diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.

Pada tahun 1974 Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk menunjang berhasilnya kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai wadah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi KPR pertama di Semarang yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 1982/1983. Guna membiayai KPR tersebut, BTN harus mampu mengarahkan dana masyarakat. Untuk itu diverfikasi produk yang bersifat ”Operasi Passiva” dan harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976 pertumbuhan aset

BTN menigkat tajam dari Rp. 11 Miliyar pada akhir 1976 menjadi Rp 3,7 Triliun pada akhir tahun 1991.

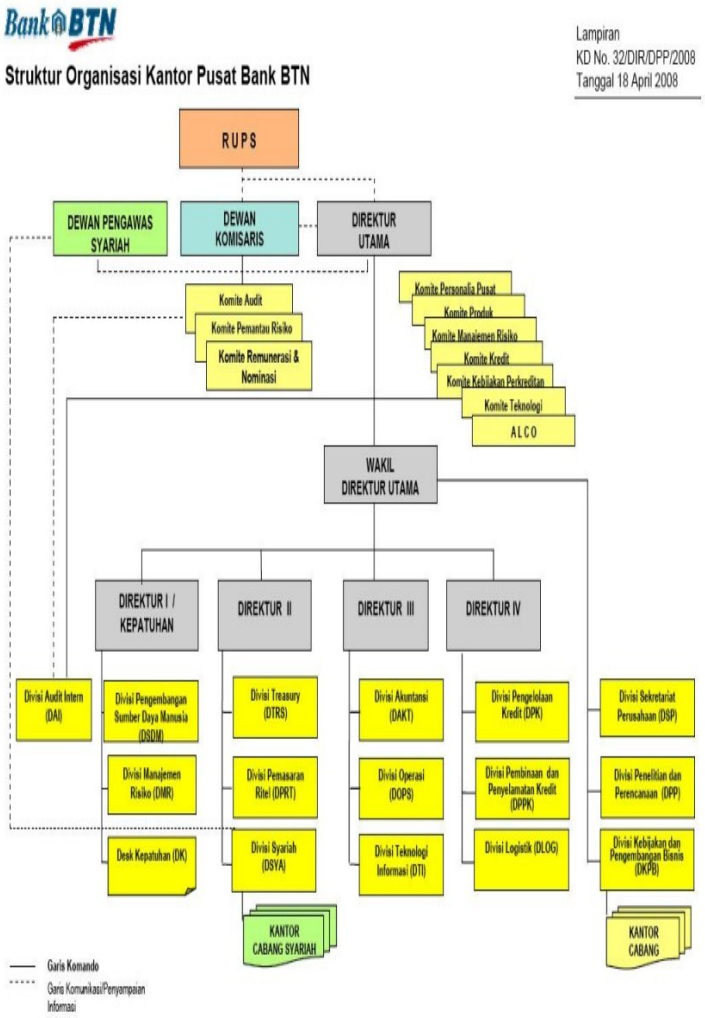
Sejak resmi berdiri 1953 sampai sekarang, telah lebih dari 38 tahun BTN menggeluti bidangnya. Jaringan operasionalnya tersebar luas di seluruh Indonesia. BTN telah mantap menyongsong pembangunan nasional tahun 2000. Baik dibidang perbankan khususnya, maupun pembiayaan perumahan. BTN juga telah mencanangkan tiga sasaran pokok dan memasyarakatkan budaya kerja yang disebut Panca Tertib. Era baru BTN juga ditandai dengan pengenalan logo baru. Memasuki tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Bank Tabungan Negara (Persero), yaitu dengan dikeluarkannya PP no. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Perubahan bentuk ini menjadikan gerak PT Bank Tabungan Negara (Persero) lebih leluasa. Apabila sebelumnya lebih ditekankan sebagai bank tabungan dan sebagai lembaga pembiayaan perumahan, maka sejak 1 Agustus 1992 bidang kegiatannya diperluas menjadi bank umum. Selanjutnya sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, dibuatkanlah Akte Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dihadapan Muhani Salim, SH notaris di Jakarta sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 6587.HT.01.01-TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 yang telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI NO. 73 tanggal 11 September 1992 (yang ada perkembangannya kemudian diubah berdasarkan akte No. 25 tanggal 4 September 1998 tentang peryataan keputusan pemegang saham perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta sesuai Keputusa Menteri Kehakiman

fan Hak Asasi Manusia RI No. C-3568 HT.01.04.TH.2001, tanggal 20 Juli 2001 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Negara Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 2001, surat Akta perubahan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 97 tanggal 28 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akte No. 97 tanggal 28 Juni 2002.

Pada tahun 1994 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dapat beroperasi sebagai Bank Devisa. Dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang meluluhlantakan ekonomi Indonesia telah membuat manajemen BTN untuk memutar kembali haluan bisnisnya. Keputusan ini pada akhirnya membantu sukses Bank BTN dalam proses rekapitalisasi ini manajemen BTN menetapkan paradigma baru sebagai bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan. BTN telah menunjukan kemampuannya dalam memberikan kontribusi pembiayaan perumahaan meskipun pemerintah berada dalam kemampuan yang terbatas. Untuk terus mendukung program pemerintah di bidang perumahan sekaligus dalam rangka memperkuat stuktur pendanaan Bank BTN, pemerintah melalui Menteri BUMN dengan suratnya No. S-554/m-mbu/2002 tanggal 21 Agustus 2002 telah memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Kini Bank BTN telah bertekad untuk menjadi bank komersial dengan bisnis utama pembiayaan perumahan dan industri ikatannya. BTN juga telah menetapkan sasaran bisnisnya sebagai Bank Keluarga Indonesia, yang melayani kebutuhan seluruh keluarga Indonesia, dari rumah untuk semua kebutuhan.

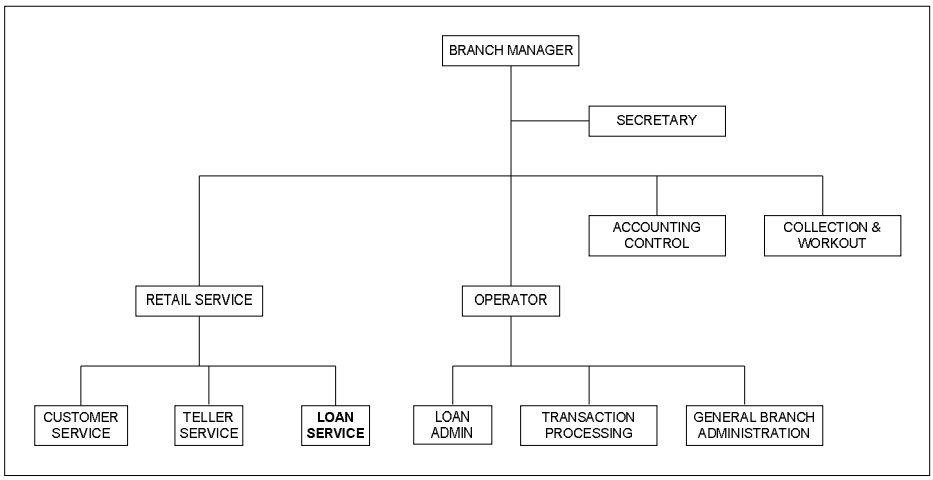
2.2 Strukutur Organisasi Perusahaan

2.2.1 Strukutur Organisasi Kantor Pusat



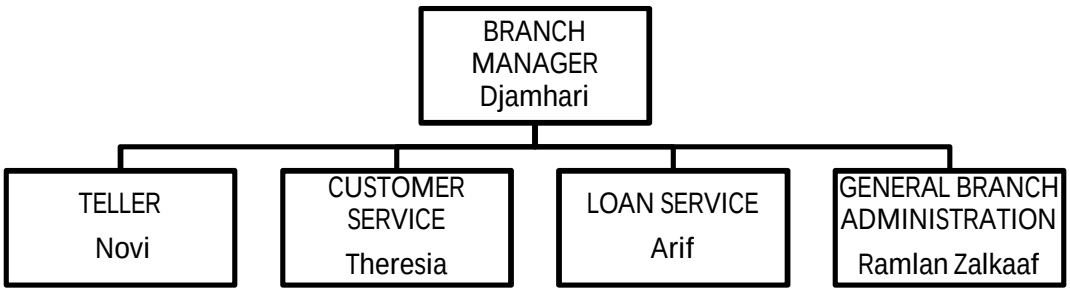
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat

2.2.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang

2.2.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Cijerah



2.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Cijerah

2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan ketetapan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero), deskripsi jabatan dari kantor cabang pembantu adalah sebagai berikut:

A.*Branch Manager*

1. Melakukan kontrol terhadap seluruh pelaksanaan MTSI.
2. Melakukan penjualan produk dana, kredit, *feebased income*, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
3. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja karyawan secara keseluruhan
4. Memutuskan transaksi bisnis
5. Mengembangkan kompetensi dan karir bawahan
6. Menetukan besarnya target dana, *feebased income* yang akan dicapai.
7. Memutuskan strategi pencapaian target
8. Memutuskan *share market dana*, kredit *feebased income* yan akan dicapai
9. Mewakili BTN dalam kegiatan resmi wilayah kerja
10. Membina hubungan baik denga pihak eksternal berkaitan dengan pencapaian target
11. Memberikan diposisi yang jelas pada bawahan serta mendistribusikan tugas (Pekerjaan) kepada bawahan.
12. Memastikan bahwa pelaporan baik untuk pihak eksternal maupun internal telah dilakukan

B.*Teller*

1. Melayani setoran tunai angsuran kredit pemilikan rumah cabang sendiri dan cabang lain.
2. Melayani penabungan dan penarikan tabungan tunai.
3. Melayani setoran dan pembayaran deposito.
4. Melayani nasabah lainnya.
5. Menerima transaksi giro.

6. Memilih rekening *Subsidiary Ledger* (SL).

C.Customer Service

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah
2. Memproses permohonan kredit.
3. Menganilisa permohonan kredit.
4. Menyelanggarakan realisasi kredit.
5. Memproses pelunasan kredit.
6. Memelihara *Subsidiary Ledger* (SL).

D.Loan Service

1. Memastikan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan di *loan service.*
2. Memastikan bahwa nasabah memperoleh layanan dengan kualitas pelayanan yang prima mulai dari permohonan kredit sampai dengan akad kredit.
3. Memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar.
4. Memastikan bahwa semua klaim debitur dapat diselesaikan dengan baik.
5. Mengkopi Rekening Koran dan Pelunasan Kredit.

E.General Branch Administration

1. Melakukan pengelolaan absensi pegawai, penilaian pegawai, administrasi pegawai, gaji, tunjangan pegawai dan dana pensiun.
2. Melakukan supervisi atas proses administrasi cuti, penyesuaian gaji pegawai lainnya, administrasi pegawai PKL, pajak karyawan, pengadaan aktiva tetap, mengadakan inventaris kantor, penghapus bukuan bahan inventaris, asuransi aktiva tetap.

3. Melakukan supervisi atas proses pemeliharaan/perbaikan aktiva tetap, barang inventaris.
4. Melakukan supervisi atas proses pemeliharaan/perbaikan aktiva tetap, barang inventaris.
5. Melakukan supervisi atas proses pengelolaan alat tulis kantor, pengadaan barang cetakan dan formulir dari kantor pusat atau rekaan, pengadaan Bilyet Cek, Bilyet Giro, Bilyet Deposito dan Kartu ATM
6. Melakukan supervisi atas pengelolaan materai tempel, sewa kendaraan, sewa rumah dinas pejabat, sewa gedung kantor.
7. Melakukan supervisi atas kegiatan Protokoler, Adminstrasi tenaga *Out Sourching*, Adiminstrasi lainnya
8. Melakukan supervisi atas Surat Perintah Pembayaran (SPM) and bukti setoran
9. Melakukan supervisi atas administrasi biaya dibayar dimuka
10. Melakukan supervisi atas kesekretariatan kantor cabang, kepala cabang

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), merupakan salah satu lembaga keuangan, yang aktivitas perusahaannya bergerak dalam bidang jasa, yang menghasilkan produk yang disalurkan yaitu:

A.Produk dana

1. Tabungan Batara
2. Tabungan Batara Prima
3. Tabungan BTN Junior
4. Tabungan Juara

5. Tabungan Haji
6. TabunganKU
7. Sertifikat Deposito
8. Giro

B. Produk jasa dan lainnya

1. ATM Batara
2. Kiriman Uang
3. Inkaso
4. Inkaso Luar negri *(collection)* yang terdir dari inkaso keluar (*outward collection)* dan inkaso masuk *(inward collection)*
5. *Safe Deposito Box*
6. Bank Garansi RTGS *(Real Time Gross Settiment)*
7. Penerimaan Biaya Perjalana Ibadah Haji (BPIH)

C.Produk Kredit yaitu:

1. Kredit Griya Utama (KGU)
2. Kredit Griya Multi (KGM)
3. Kredit Kepemilikan ruko
4. Kredit Swagriya
5. *Real Cash*
6. Kredit Swagriya
7. Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (RS)
8. Kredit Swadana